

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Muhammad Nur¹ dan Novri Naldi²

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau

*E-mail:

m.nurdrsmuhammadnur@gmail.com

Untuk mengutip artikel ini:

Nur M & Novri Naldi, 2016, 'Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Vol. 27, No. 1, Hal. 8-12.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1999-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1999-2010. Belanja pemerintah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1999-2010. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah secara signifikan atau signifikan parsial terhadap total impor Indonesia periode 1989-2007 mendukung teori yang dikemukakan sebelumnya oleh John Maynard Keynes bahwa besar kecilnya impor lebih dipengaruhi oleh pendapatan negara. Artinya realisasi impor berkaitan langsung dengan kemampuannya membiayai impor. Analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar tingkat impor.

Government spending and the money supply simultaneously (together) significantly affect the economic growth of Indonesia period 1999-2010. The results of this analysis showed that the variables under study do give a real impact on economic growth in Indonesia period 1999-2010. Government spending is a positive and significant effect partially on the economic growth of Indonesia period 1999-2010. The results of this study state that government spending significantly or significantly partial to total imports of Indonesia period 1989-2007 to support the theory presented earlier by John Maynard Keynes that the size of imports is more influenced by the country's income. That is the realization of imports directly related to its ability to finance imports. The analysis of this study concluded that the greater a country's national income, the greater the imports.

Katakunci: Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Uang Beredar, Pertumbuhan Ekonomi

1. Pendahuluan

Ketimpangan pembagian pendapatan di negara-negara berkembang sejak tahun tujuh puluhan telah menjadi perhatian utama dalam menetapkan kebijaksanaan pembangunan. Perhatian ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya, kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pembagian pendapatan dengan penelitiannya di beberapa negara. Usaha meningkatkan pembangunan ekonomi adalah tidak mungkin perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi diperlukan adanya peranan pemerintah dalam hal mengatur ekonomi.

Yang di maksud dengan kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik/masyarakat dalam upaya (a) menekan fluktuasi bisnis, dan (b) ikut berperan menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Kebijakan fiskal berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran publik, bekerja sama dengan kebijakan moneter, dilaksanakan untuk mencapai sasaran

pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan kesempatan kerja yang tinggi serta kestabilan harga. (Samuelson Nordhaus, 2005:346)

Pengeluaran pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Konsumsi dan investasi merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Seperti kita ketahui dalam konsep makroekonomi dan pembangunan ekonomi bahwa PDB (Y) terdiri dari konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan net ekspor (X-M) atau $Y = C + I + G + (X - M)$. Pengeluaran rutin pemerintah di gunakan untuk pengeluaran yang kurang produktif dan mengarah kepada konsumsi dan bersifat sebagai pengganda sedang pengeluaran pembangunan lebih bersifat investasi.

Sementara Wijaya (2000:83) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (Multiplier effect) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar dari pada pembayaran dalam jumlah yang sama. Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda

sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (full employment).

Dengan meningkatnya kegiatan investasi maka akan meningkatkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Peningkatan pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar dapat digambarkan secara bersama yang mempengaruhi pendapatan nasional.

Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah adalah: “Seberapa Besar Pengaruh Kebijakan Fiskal Dari Sisi Pengeluaran Pemerintah Dan Kebijakan Moneter Dari Sisi Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia” ?

2. Tinjauan Teoritis

2.1 Kebijakan Fiskal

Yang di maksud dengan kebijakan fiskal adalah proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran pemerintah untuk kepentingan publik/masyarakat dalam upaya (a) menekan fluktuasi bisnis, dan (b) ikut berperan menjaga pertumbuhan ekonomi, penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Kebijakan fiskal berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran publik, bekerja sama dengan kebijakan moneter, dilaksanakan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan kesempatan kerja yang tinggi serta kestabilan harga. (Samuelson Nordhaus, 2005:346).

Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner. Ia dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk merubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk (i) mengurangi gerak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu, dan (ii) menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, tidak menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan (Sukirno. 2002:179)

2.2 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh satu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. (Lincoln, 1999:11).

Dalam pembangunan ekonomi terkandung arti adanya usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita masyarakat/GDP dimana kenaikannya dibarengi dengan perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*). Pada umumnya

pembangunan selalu dibarengi dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. (2000: 4).

Indikator ekonomi berdasarkan pendekatan makro sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak mengamati perkembangan kegiatan perekonomian. Indikator dapat mendukung kajian masalah empiris. Salah satu indikator penting untuk menganalisis ekonomi yang terjadi pada awal pembangunan suatu negara/daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Namun perlu dipahami bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan berarti terjadinya pembangunan, akan tetapi pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional maupun regional, sedangkan pembangunan berdimensi luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. (Mudrajat, 2002:9).

2.3 Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana publik yang paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur adalah merupakan publik service obligation, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah. Data empiris menunjukkan hubungan yang kuat antara ketersediaan infrastruktur dasar dengan pendapatan masyarakat diberbagai negara. Dengan demikian keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Kurdi, 2001:43).

Infrastruktur merupakan suatu instrument untuk memperlancar berputarnya roda perekonomian. Semakin tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan ekonomi disuatu daerah. Begitu juga sebaliknya pembangunan yang berjalan cepat akan menuntut tersedianya infrastruktur adalah jalan raya, rel kereta api, pelabuhan laut, Bandar laut, Bandar udara, alat pengangkutan dan telekomunikasi. selain itu ada pula jenis infrastruktur lain seperti listrik, instalasi pipa air dan pipa gas (Basri, 2002: 300).

2.4 Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilaksanakan oleh bank sentral. Kebijakan moneter dibedakan kepada kebijakan yang bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif merupakan suatu kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian, dan dibedakan dalam tiga tindakan yaitu (a) melakukan jual beli surat-surat berharga didalam pasar surat-surat berharga tersebut, langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka (b) membuat perubahan keatas tingkat diskonto dan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum dan (c) membuat perubahan keatas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum. Sedangkan kebijakan

moneter kualitatif tersebut melakukan kebijakan terpilih keatas beberapa aspek dari masalah moneter yang di hadapi pemerintah, dan pelaksanaanya seperti pengawasan pinjaman secara selektif dan pembujukan moral. (Sukirno, 2002: 233).

2.5 Uang dan Fungsi Uang

Perekonomian kita memerlukan jumlah uang yang cukup tapi tidak berlebih-lebihan. Jika jumlah uang beredar meningkat dengan dengan cepat, maka terjadi inflasi disertai dengan semua akibat buruknya terhadap proses ekonomi. Sebaliknya jika jumlah uang beredar sedikit menyebabkan kelambanan produksi. Tujuan kebijaksanaan bank sentral adalah menyediakan jumlah uang yang disesuaikan dengan tujuan nasional menciptakan harga yang stabil, pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan sesuatu tingkat kesempatan kerja yang baik (Edwar 1995: 4)

Uang biasanya didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar (*medium of exchange*) adalah segala hal yang secara luas diterima dalam suatu masyarakat sebagai penukar barang dan jasa(Lipsey, et all, 1995: 187) sedangkan untuk menilai benda lain dan dapat kita simpan, serta digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang (Suseno, 2005:1).

Uang memiliki empat fungsi penting yaitu (Mulia, 1998:3):

- Alat tukar menukar (*medium of exchange*)
Uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa.
- Alat penyimpan uang (*store of value*)
Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berubah uang tunai atau uang yang disimpan di bank dalam bentuk rekening
- Satuan hitung (*unit of account*)
Uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli
- Standar pembayaran dimasa yang akan datang (*standar of deffered payment*)

Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar penyicilan hutang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsuran. Dengan adanya uang maka secara mudah ditentukan berapa besar nilai utang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dimasa yang akan datang

3. Hasil Penelitian

3.1 Pengaruh Kebijakan Fiskal Dari Sisi Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kebijakan makroekonomi berbentuk kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah dalam membuat perubahan dalam bidang penerimaan Negara/ perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud

untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian dengan menerapkan kebijakan fiskal adalah dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk dapat mendukung usaha peningkatan pembangunan dan perekonomian.

Pengeluaran pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Tujuan kebijakan fiskal mencapai atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melalui upaya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Memperluas lapangan kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan menanggulangi kemiskinan, menstabilkan harga-harga barang khususnya mengatasi inflasi. Pada tabel dibawah ini akan dapat dilihat realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah Indonesia pada tahun 2000-2010.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 2000-2010

| No | Tahun | Pengeluaran Pemerintah (Milyar Rp) | Pertumbuhan Pengeluaran |
|----|-------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 1999 | 245.192 | 13,7 |
| 2 | 2000 | 221.468 | -9,7 |
| 3 | 2001 | 341.564 | 54,2 |
| 4 | 2002 | 322.180 | -5,7 |
| 5 | 2003 | 376.505 | 16,9 |
| 6 | 2004 | 435.677 | 15,7 |
| 7 | 2005 | 509.419 | 16,9 |
| 8 | 2006 | 699.099 | 37,2 |
| 9 | 2007 | 752.373 | 7,6 |
| 10 | 2008 | 1.022.621 | 35,9 |
| 11 | 2009 | 1.037.067 | 1,4 |
| 12 | 2010 | 1.042.133 | 0,5 |

Sumber : *Badan Pusat Statistik Indonesia (2011) Riau 2011*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah mengalami fluktuasi bahkan minus. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. Realisasi penerimaan Negara selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2002, hal ini karena pemerintah melakukan kebijakan memperbesar penerimaan Negara melalui sektor penerimaan pajak. Namun penerimaan tersebut lebih rendah dari pengeluarannya, hal ini berarti bahwa APBN Negara Indonesia mengalami defisit anggaran. Seperti pada tahun 2008 penerimaan Negara sebesar Rp 962.482 miliar dan melakukan pengeluaran sebesar Rp. 1.022.621 miliar, berarti Negara mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 60.139 miliar.

3.2 Pengaruh Kebijakan Fiskal dari Sisi Pengeluaran Pemerintah dan Kebijakan Moneter Dari Sisi Jumlah Uang Beredar (M1) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Untuk mengetahui pengaruh suatu variable independent (Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang

Beredar) terhadap variable dependent (Pertumbuhan Ekonomi Indonesia). Pengaruh pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggunakan model analisa regresi berganda, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau $\alpha = 0,5\%$ atau 0,05 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Estimasi Regresi Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 10/25/12 Time: 10:50
Sample: 1999 2010
Included observations: 12

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C | -7.453380 | 4.296301 | -1.734837 | 0.1168 |
| X1 | 1.233489 | 0.817003 | 2.441873 | 0.0347 |
| X2 | 0.973739 | 0.504550 | 2.726228 | 0.0213 |
| R-squared | 0.832773 | Mean dependent var | 5.150000 | |
| Adjusted R-squared | 0.728945 | S.D. dependent var | 0.805097 | |
| S.E. of regression | 0.608398 | Akaike info criterion | 2.056342 | |
| Sum squared resid | 0.271055 | Schwarz criterion | 2.177568 | |
| Log likelihood | -9.338050 | Hannan-Quinn criter. | 2.011459 | |
| F-statistic | 5.131292 | Durbin-Watson stat | 1.801758 | |
| Prob(F-statistic) | 0.032574 | | | |

Sumber : Eviews 7

3.2.1 Analisis Regresi

Persamaan multiple regresi dalam penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Konstanta $\beta_0 = -7.45338013521$ memberikan arti bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan memiliki nilai -7.45338013521 milyar rupiah jika Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Jumlah Uang Beredar diabaikan.
- Nilai koefisien $\beta_1 = 1.23348933957$, artinya apabila Jumlah Uang Beredar dianggap konstan maka peningkatan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 milyar rupiah akan menaikkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 1.23348933957 milyar rupiah.
- Nilai koefisien $\beta_2 = 0.973738949558$, artinya apabila Pengeluaran Pemerintah dianggap konstan maka kenaikan Jumlah

Uang Beredar sebanyak 1 milyar maka Pertumbuhan Ekonomi Indonesia akan naik 0.973738949558 milyar rupiah.

3.2.2 Uji F

Uji F ini dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama (menyeluruh) berpengaruh terhadap variabel bebas. Adapun hipotesanya pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- H0 = variable bebas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
H1 = variable bebas berpengaruh terhadap variabel dependen

Dengan Kriteria Pengujian:

H0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel} [(\alpha), (k-1), (n-k)]$

H1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel} [(\alpha), (k-1), (n-k)]$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh F_{hitung} sebesar 5,131292 dan nilai $F_{tabel} (0,05), (2), (9) = 4,26$. Jadi $F_{hitung} (5,13) > F_{tabel} (4,26)$, maka hipotesa nol ditolak artinya bahwa pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3.2.3 Uji t (t-test)

Untuk menguji pengaruh masing-masing faktor penentu yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka akan dilakukan uji-t atau T test dengan bentuk hipotesa sebagai berikut :

- H0 = variable bebas tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
H1 = variable bebas berpengaruh terhadap variabel dependen

Dengan Kriteria Pengujian:

H0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel} [(\alpha/2); (n-k)]$

H1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel} [(\alpha/2); (n-k)]$

Dengan derajat kebebasan (df / degrees of freedom) observasinya adalah $n-k = 12 - 3 = 9$ dengan $\alpha = 0,05$, maka $0,05/2 = 0,025$, sehingga $t (0,025 : 9)$ adalah sebesar 2,2622.

Berdasarkan hasil penelitian dimana nilai t_{hitung} X1 dari variabel pendapatan adalah 2,4418 lebih besar dari $t_{tabel} = 2,2622$ maka hipotesa nol ditolak artinya bahwa pada tingkat keyakinan 95% variable pengeluaran pemerintah secara individu memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk nilai t_{hitung} -X2 dari variabel jumlah uang beredar adalah 2,7262 lebih besar dari $t_{tabel} 2,2622$ maka hipotesa nol ditolak, artinya bahwa pada tingkat keyakinan 95% variable jumlah uang beredar juga memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

3.2.4. Koefisien Korelasi (R)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh besarnya koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,832. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan korelasi yang kuat positif antara variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar.

3.2.5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa besar persentase variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama (menyeluruh). Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R^2 sebesar 0,728. Nilai ini memberi indikasi bahwa 72% pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar, sedangkan sisanya 28% dipengaruhi variabel lain.

4. Simpulan

Pengeluaran pemerintah dan jumlah uang yang beredar secara serempak (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1999-2010. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang diteliti memang memberikan pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1999-2010.

5. Saran

Total impor Indonesia dari tahun ke tahun tidak selamanya menunjukkan bahwa competitive advantage Indonesia itu tidak baik, justru bisa menjadi cermin bahwa daya beli masyarakat Indonesia semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Basri. Faisal 2002, *Menuju Kebangkitan Perekonomian Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Boediono, 2001. *Ekonomi Moneter*, BPFE. Yogyakarta.
- Dornbush, Rudiger. 2004. *Makro Ekonomi*. Media Global Edukasi. Jakarta.
- Edward, W. Reed. 1995. *Bank Umum*. Bumi Aksara. Jakarta
- Gaspersz, Vincent. 1991. *Ekonomitrika Terapan*. Tarsito. Jakarta
- Hermawati, Lisa. 2004. Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi Dengan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Di Kabupaten Ogan Komering Ula Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Sriwijaya.
- Inggrid. 2006. Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Pendekatan Kausalitas dalam Multivariate Vector Error Correction Model (VECM). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Kristen Petra Surabaya.
- Irawan, Ferri dan Safuan, Sugiharso. 2005, Kebijakan Moneter, Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi: *Pengujian Hipotesis Ekspektasi Rasional Dengan Analisis VAR*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Judisseno, Rimsky K. 2002. *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Kurdi, yasin. 2001. *Pengembangan Peranan Pemerintah Terhadap Perkembangan Infrastruktur*. LP3S. Jakarta.
- Lincoln, Arsyad. 1999, *Ekonomi Pembangunan*, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Lipsey, Ricard G. 1995. *Ekonomi 10th ed*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Lisna, Afria. 2007. Peranan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Prasarana Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Palalawan Skripsi. Universitas Riau
- Mackie J.A.C. 2000. *Sejarah Pembangunan Ekonomi Dalam Dunia Modern*. PT. Pembangunan Jakarta
- Makmun, Sudaryanto. 2002. *Pola Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur*. LP3S. Jakarta
- Malayu, S.P Hasibuan. 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Mangkoesebroto, Goeritno. 2001. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta
- Mankiw, N. Gregoia, 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Kelima, Erlangga Jakarta
- Mardjana, IK. 2000. Permodalan di Indonesia Dalam Arus Globalisasi. Rajawali Pers. Jakarta
- Mudrajad, Kuncoro. 2002. Beberapa Aspek Dalam Pembangunan Daerah. LBFE, UI. Jakarta
- Mulia Nasution. 1998. *Ekonomi Moneter Uang dan Bank*. Djambatan. Jakarta
- Nopirin, 2002. *Ekonomi Moneter*. Buku I Edisi ke 4. BPFE. Yogyakarta.
- Pratama dan Mandala. 2001. *Perencanaan Ekonomi Pembangunan*, Rajawali Grafindo. Jakarta
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Edisi Bahasa Indonesia. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Sanusi, Bachrawi. 2003. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. FE-UI. Jakarta
- Siamat, Dahlan. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. LP-FEUI. Jakarta.
- Sukirno, sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern, Pembangunan Pemikiran Dari Ekonomi Klasik Sampai Ekonomi Modern*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparmoko, M. 2002. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. BPFE. Yogyakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suseno, Solikin. 2005. *Uang*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta.
- Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia Beberapa Isu Penting. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Teguh, Muhammad. 1999. *Metode Penelitian Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wijaya. 2000. *Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Internal Ekonomi Makro Indonesia*. ITB Central Library, Ganesha Digital Library.
- Zhang, T., and H. Zou. 2001. The Growth Impact of Intersectoral and Intergovernmental Allocation of Public Expenditure: *With Application to China and India*. *China Economic Review*, 12:58-81